

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

LAPORAN

**EVALUASI RENJA
TRIWULAN IV
TA 2023**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mengacu kepada RKPD dan memuat kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah terkait.

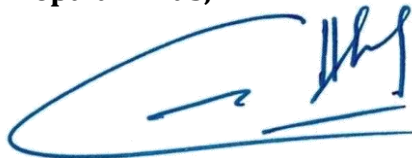
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup Provinsi mencakup evaluasi program Perangkat Daerah.

Evaluasi Program Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah Provinsi tercapai dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi, dilakukan dengan menilai program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dengan melakukan penilaian terhadap realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Demikian Laporan Evaluasi Program Perangkat Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2024

Kepala Dinas,



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai ***Fungsi:***

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun rencana kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung tahun selanjutnya.

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung.
2. Mendorong Dinas PPPA Provinsi Lampung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Persandingan antara Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

[illegible]

2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada APBD Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 10 Program, 23 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Berikut adalah Matriks Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :

RENJA	RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi
Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi	Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

RENJA	RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina

RENJA	RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2019-2024.

2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Pagu pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra

RENJA			RENSTRA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		12.421.071.866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		12.421.071.866
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	8 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	8 Laporan	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.896.260.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.896.260.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	8.471.260.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	8.471.260.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	350.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.575.661.866	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.575.661.866
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	28.280.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	28.280.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 unit	220.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 unit	220.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	8.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	25.000.000
Penyediaan Bahan/Material	12 pKet	33.000.000	Penyediaan Bahan/Material	12 pKet	33.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	79.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	79.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.182.381.866	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.182.381.866
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		287.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		287.500.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.290.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.290.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 unit	247.210.0.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 unit	247.210.0.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		646.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		646.650.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	196.650.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	196.650.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	450.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		690.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		690.000.000

RENJA			RENSTRA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	400.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170 unit	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	230.000.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		690.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		690.000.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		260.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		260.000.000
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	49 PD	260.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	49 PD	260.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		280.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		280.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	280.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	280.000.000
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi		150.000.000	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi		150.000.000
Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenangan Provinsi	1 dokumen	150.000.000	Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi	1 dokumen	150.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.422.330.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.422.330.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		680.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		680.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	180.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	15 PD	500.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	15 PD	500.000.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		379.564.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		379.564.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	50.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	329.564.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	329.564.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		362.766.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		362.766.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	230.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	230.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30	79.366.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30	79.366.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	53.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	53.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		600.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		600.000.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		600.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		600.000.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan	600.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan	600.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		440.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		440.000.000
Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam		440.000.000	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam		440.000.000

RENJA			RENSTRA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 dokumen	240.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 dokumen	240.000.000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	200.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	200.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		830.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		830.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		830.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		830.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	240.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	240.000.000
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	170.000.000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	170.000.000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		232.500.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		232.500.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		182.500.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		182.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	182.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	182.500.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		50.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		50.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		160.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		160.000.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		160.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		160.000.000
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 dokumen	160.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 dokumen	160.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		165.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		165.000.000
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		165.000.000	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		165.000.000
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	165.000.000	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	165.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		370.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		370.000.000
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		260.000.000	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		260.000.000
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 dokumen	50.000.000	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	210.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	210.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		110.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan		110.000.000

RENJA			RENSTRA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 dokumen	110.000.000	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 dokumen	110.000.000

2.4Perbandingan Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Pagu pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

RENJA			DPA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		12.421.071.866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		12.371.691.511
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		105.600.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	105.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	8 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	-	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.896.260.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.459.078.511
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	8.471.260.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	8.149.078.511
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	235.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.575.661.866	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.169.796.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	28.280.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	28.280.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 unit	220.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 unit	123.580.250
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	8.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	25.000.000
Penyediaan Bahan/Material	12 pKet	33.000.000	Penyediaan Bahan/Material	12 paket	33.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	79.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.182.381.866	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.910.735.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		287.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		256.228.800
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.290.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.290.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 unit	247.210.0.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	215.938.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		646.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		461.020.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	196.650.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	126.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	334.420.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		690.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		769.968.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	455.858.200

RENJA			DPA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84 unit	56.640.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	257.470.000
PROGRAMPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		690.000.000	PROGRAMPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1.007.955.000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		260.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		367.088.000
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	49 PD	260.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	49 PD	367.088.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		280.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		513.840.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	280.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi KewenanganProvinsi	1 Dokumen	513.840.000
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi		150.000.000	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi		127.027.000
Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenangan Provinsi	1 dokumen	150.000.000	Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan kewenanganprovinsi	1 dokumen	127.027.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.422.330.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.085.840.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		680.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		676.918.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	181.918.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	15 PD	500.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	15 PD	495.000.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		379.564.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		217.500.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	50.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	329.564.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	217.500.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		362.766.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		191.422.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	230.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	191.422.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30	79.366.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	53.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		600.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		535.780.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Ksetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		600.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Ksetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		535.780.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan	600.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan	535.780.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		440.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		241.243.000
Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		440.000.000	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		241.243.000

RENJA			DPA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 dokumen	240.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 dokumen	132.204.000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	200.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 dokumen	109.039.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		830.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		666.203.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		830.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		666.203.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	240.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	178.510.000
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	170.000.000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	77.690.000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	410.003.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		232.500.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		249.182.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		182.500.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		185.432.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	182.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	185.432.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		50.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		63.750.000
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	63.750.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		160.000.000	PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK		61.038.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		160.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		61.038.000
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 dokumen	160.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 dokumen	61.038.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		165.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		71.918.000
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		165.000.000	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		71.918.000
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	165.000.000	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	71.918.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		370.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.265.888.000
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		260.000.000	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1.180.000.000
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 dokumen	50.000.000	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	-	0
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	210.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	1.180.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		110.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		85.888.000

RENJA			DPA		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 dokumen	110.000.000	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 dokumen	85.888.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA PD

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100	49.021.112.900	100	11.838.241.471	100	12.371.691.511	100	11.833.276.288	100,00	95,65	100	23.671.517.759	100,00	48,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100	800.000.000	100	171.577.200	100	105.600.000	100	105.509.100	100,00	99,91	100	277.086.300	100,00	34,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	60	600.000.000	32	278.777.200	17	105.600.000	17	105.509.100	100,00	99,91	49	384.286.300	81,67	64,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	100	35.380.710.000	100	8.456.536.448	100	8.459.078.511	100	7.951.480.599	100,00	94,00	100	16.408.017.047	100,00	46,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	33.705.710.000	132	15.226.647.721	66	8.149.078.511	66	7.641.646.799	100,00	93,77	198	22.868.294.520	75,00	67,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	68	1.400.000.000	34	1.074.971.500	4	235.000.000	4	234.930.800	100,00	99,97	38	1.309.902.300	55,88	93,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	275.000.000	5	74.991.900	4	75.000.000	4	74.903.000	100,00	99,87	9	149.894.900	45,00	54,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	100	175.000.000	100	49.997.900	100	50.000.000	100	49.999.500	100,00	100,00	100	99.997.400	100,00	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16	175.000.000	4	49.997.900	1	50.000.000	1	49.999.500	100,00	100,00	5	99.997.400	31,25	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100	300.000.000	100	72.590.000	100	100.000.000	100	86.244.900	100,00	86,24	100	158.824.900	100,00	52,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16	200.000.000	4	49.990.000	4	50.000.000	4	49.999.900	100,00	100,00	8	99.989.900	50,00	49,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	100.000.000	5	22.590.000	5	50.000.000	5	36.245.000	100,00	72,49	10	58.835.000	50,00	58,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	100	6.564.397.850	100	1.873.090.177	100	2.169.796.000	100	2.168.754.242	100,00	99,95	100	4.041.844.419	100,00	61,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	113.120.000	12	28.279.900	12	28.280.000	12	28.279.900	100,00	100,00	24	56.559.800	50,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	460	750.230.000	115	318.319.300	23	123.580.250	23	123.550.200	100,00	99,98	138	441.869.500	30,00	58,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	48	39.156.650	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100,00	100,00	24	16.000.000	50,00	40,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	100.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	100,00	100,00	24	50.000.000	50,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	48	132.000.000	12	32.984.000	12	33.000.000	12	32.996.000	100,00	99,99	24	65.980.000	50,00	49,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	Rp	5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.8.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	316.000.000	12	79.000.000	12	41.200.000	12	41.118.700	100,00	99,80	24	120.118.700	50,00	38,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	5.113.891.200	12	1.381.506.977	12	1.910.735.750	12	1.909.809.442	100,00	99,95	24	3.291.316.419	50,00	64,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	941.330.000	100	179.050.000	100	256.228.800	100	252.463.200	100,00	98,53	100	431.513.200	100,00	45,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	2	201.464.000			1	40.290.000	1	40.288.000	100,00	100,00	1	40.288.000	50,00	20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	84	941.330.000	21	179.050.000	12	215.938.800	12	212.175.200	100,00	98,26	33	391.225.200	39,29	41,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	2.245.490.000	100	510.105.297	100	461.020.000	100	449.366.762	100,00	97,47	100	959.472.059	208,33	42,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	684.000.000	12	98.585.297	12	126.600.000	12	114.946.762	100,00	90,80	24	213.532.059	50,00	31,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	1.561.490.000	12	411.520.000	12	334.420.000	12	334.420.000	100,00	100,00	24	745.940.000	50,00	47,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.614.185.050	100	525.304.449	100	769.988.200	100	769.457.985	100,00	99,93	100	1.294.762.434	100,00	49,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	1.597.084.000	15	317.003.449	15	455.858.200	15	455.723.985	100,00	99,97	30	772.727.434	50,00	48,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	452	235.840.000	113	58.860.000	84	56.640.000	84	56.640.000	100,00	100,00	197	115.500.000	43,58	48,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	781.261.050	1	149.441.000	1	257.470.000	1	257.094.000	100,00	99,85	2	406.535.000	50,00	52,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Perempuan dan Perlindungan Gender	100	1.844.345.000	100	791.960.055	100	1.007.955.000	100	1.007.758.400	100,00	99,98	100	1.799.718.455	100,00	97,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang Melaksanakan PUG	100	869.126.000	100	224.997.055	100	367.088.000	100	366.909.700	100,00	99,95	100	591.906.755	100,00	68,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	196	869.126.000	49	224.997.055	49	367.088.000	49	366.909.700	100,00	99,95	98	591.906.755	50,00	68,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	100	975.219.000	100	566.963.000	100	513.840.000	100	513.829.700	100,00	100,00	100	1.080.792.700	100,00	110,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	4	975.219.000	1	566.963.000	1	513.840.000	1	513.829.700	100,00	100,00	2	1.080.792.700	50,00	110,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
2.8.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar KIE PPPA	100	250.000.000			100	127.027.000	100	127.019.000	100,00	99,99	100	127.019.000	100,00	50,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.3.3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2	250.000.000			1	127.027.000	1	127.019.000	100,00	99,99	1	127.019.000	50,00	50,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Olah UPTD PPA	100	3.686.183.000	100	1.296.460.426	100	1.085.840.000	100	1.079.174.840	100,00	99,39	100	2.375.635.266	100,00	64,45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	100	2.190.161.000	100	668.997.326	100	676.918.000	100	670.269.240	100,00	99,02	100	1.339.266.566	100,00	61,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Provinsi	4	525.161.000	1	257.159.500	1	181.918.000	1	181.882.000	100,00	99,98	2	439.041.500	50,00	83,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang Mendapatkan Pendampingan layanan perlindungan perempuan Kewenangan provinsi	60	1.665.000.000	15	411.837.826	15	495.000.000	15	488.387.240	100,00	98,66	30	900.225.066	50,00	54,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	1.496.022.000	100	282.044.000	100	217.500.000	100	217.500.000	100,00	100,00	100	499.544.000	100,00	33,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan provinsi	200	1.451.022.000	50	262.044.000	50	217.500.000	50	217.500.000	100,00	100,00	100	479.544.000	50,00	33,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perempuan dalam Konflik Sosial	100	1.245.645.000	50	345.419.100	100	191.422.000	100	191.405.600	100,00	99,99	100	536.824.700	100,00	43,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	200	847.347.000	50	345.419.100	1	191.422.000	1	191.405.600	100,00	99,99	51	536.824.700	25,50	63,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pendampingan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	100	2.199.934.400	100	524.846.000	100	535.780.000	100	533.920.779	100,00	99,65	100	1.058.766.779	100,00	48,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	100	2.199.934.400	100	524.846.000	100	535.780.000	100	533.920.779	100,00	99,65	100	1.058.766.779	100,00	48,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	4	2.199.934.400	1	524.846.000	1	535.780.000	1	533.920.779	100,00	99,65	2	1.058.766.779	50,00	48,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5	PROGRAM PENGEL OLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100	1.957.093.200	100	524.823.100	100	241.243.000	100	240.597.500	100,00	99,73	100	765.420.600	100,00	39,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaluran Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	100	1.957.093.200	100	524.823.100	100	241.243.000	100	240.597.500	100,00	99,73	100	765.420.600	100,00	39,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.8.5.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	4	727.537.400	1	198.919.000	1	132.204.000	1	131.589.000	100,00	99,53	2	330.508.000	50,00	45,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelenbagaan data provinsi	4	1.229.555.800	1	325.904.100	1	109.039.000	1	109.008.500	100,00	99,97	2	434.912.600	50,00	35,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Lintas Pihakda Lintas Sektor Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	2.594.532.000	100	834.857.750	100	666.203.000	100	665.471.410	100,00	99,89	100	1.500.329.160	100,00	57,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2	Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	2.594.532.000	100	1.024.350.850	100	666.203.000	100	665.471.410	100,00	99,89	100	1.689.822.260	100,00	65,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	4	752.176.000	1	334.073.750	1	178.510.000	1	177.847.040	100,00	99,63	2	511.920.790	50,00	68,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Promosi Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi untuk anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	4	475.347.000	1	325.904.100	1	77.690.000	1	77.663.370	100,00	99,97	2	403.567.470	50,00	84,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.4	Pengualan, Jejaring An tar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengualan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	4	1.367.009.000	1	364.373.000	1	410.003.000	1	409.961.000	100,00	99,99	2	774.334.000	50,00	56,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan dari UPTD PPA	100	541.098.000	100	309.885.000	100	249.182.000	100	248.528.400	100,00	99,74	100	558.413.400	100,00	103,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	100	541.098.000	100	208.079.000	100	185.432.000	100	185.324.000	100,00	99,94	100	393.403.000	100,00	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	4	541.098.000	1	208.079.000	1	185.432.000	1	185.324.000	100,00	99,94	2	393.403.000	50,00	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.3	Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kaasu Kekerasan Terhadap Anak yang Didindaklanjuti sesuai Ketentuan	100	160.000.000	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.204.400	100,00	99,14	100	140.010.400	100,00	87,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	4	160.000.000	1	76.806.000	1	63.750.000	1	63.204.400	100,00	99,14	2	140.010.400	50,00	87,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)	8	318.652.000	15,83	90.000.000	15	61.038.000	11,44	60.965.900	100,00	99,88	11,44	150.965.900	57,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.2.1	Penaduan dan Sinkronisasi Kebutuhan Daerah Provinsi dengan rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	100	318.652.000	100	90.000.000	100	61.038.000	100	60.965.900	100,00	99,88	100	150.965.900	100,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12	
																		5=n-1
2.14.2.1.7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Melalui Satuan Pendidikan, Jalur SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Dinas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana melalui satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada pengelola kelompok kegiatan masyarakat	4	318.652.000	1	90.000.000	61.038.000	1	60.965.900	99,88	100,00	2	150.965.900	50,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	100	481.302.000	100	139.157.000	71.918.000	100	71.843.800	99,90	100,00	100	211.000.800	100,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.3.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	481.302.000	100	139.157.000	71.918.000	100	71.843.800	99,90	100,00	100	211.000.800	100,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.3.1.8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	4	481.302.000	1	139.157.000	71.918.000	1	71.843.800	99,90	100,00	2	211.000.800	50,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	986.086.000	100	315.000.000	1.265.888.000	100	1.265.517.700	99,97	100,00	100	1.580.517.700	100,00	160,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.4.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	660.380.000	100	225.000.000	1.180.000.000	100	1.179.648.800	99,97	100,00	100	1.404.648.800	100,00	212,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.4.1.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyajian pengasuhan 1000 HPK	4	1.660.380.000	1	225.000.000	1.180.000.000	1	1.179.648.800	99,97	100,00	2	1.404.648.800	50,00	84,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.4.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan edukasi pembangunan keluarga	100	325.706.000	100	90.000.000	85.888.000	100	85.868.900	99,98	100,00	100	175.868.900	100,00	54,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.14.4.2.4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Batita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Batita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4	325.706.000	1	90.000.000	85.888.000	1	85.868.900	99,98	100,00	2	175.868.900	50,00	54,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Rata-rata capaian kinerja										Sangat Tinggi		96,87						

3.2 Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2023

Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		Ket
			Target	Realisasi	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3.1	6.35	
1.2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	
1.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.1	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	67,71	70.80	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2023 :

1. Adanya intimidasi dari pihak pelaku atau keluarga korban dalam upaya Penanganan Korban Tindak Kekerasan.
2. Tidak semua keluarga korban mendukung korban/keluarga untuk melaporkan ke UPTD-P2TP2A.
3. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum optimal.

4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PPA
2. komitmen untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan
3. Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki Ruman Aman
4. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Dinas PPPA Kabupaten/Kota dan OPD se-Provinsi Lampung, Rapat Pokja PUG, Rapat Tim Driver PUG

4.3 Rekomendasi Kebijakan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan.
2. UPTD-PPA perlu menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pembaharuan data kasus secara berkala, juga untuk menjadi operator yang menginput data ke SIMFONI-PPA. Dengan demikian data

kasus yang dihimpun di akhir tahun dapat disajikan sebagai data valid dan akuntabel

3. Mendorong Perangkat Daerah di Provinsi Lampung untuk menyusun GAB dan GBS sebagai satu kesatuan dari DPA di masing-masing Perangkat Daerah, memasukkan isu-isu gender ke dalam Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah dan menuntut peran aktif dari Tim Focal Point perencanaan Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi mencakup evaluasi Renja SKPD.

Penyusunan Evaluasi Renja SKPD dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja SKPD Provinsi tercapai dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD Provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Provinsi, yang dilakukan dengan menilai program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dengan melakukan penilaian terhadap realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,87%. Jika melihat hasil diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan antara lain:

1. Pentingnya perencanaan yang matang, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengoptimalan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan agar pencapaian indikator kinerja program-program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra efektif tercapai.

Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100	49.021.112.900	100	11.838.241.471	100	12.371.691.511	100	11.833.276.288	100,00	95,65	100	23.671.517.759	100,00	48,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100	800.000.000	100	171.577.200	100	105.600.000	100	105.509.100	100,00	99,91	100	277.086.300	100,00	34,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	60	600.000.000	32	278.777.200	17	105.600.000	17	105.509.100	100,00	99,91	49	384.286.300	81,67	64,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	100	35.380.710.000	100	8.456.536.448	100	8.459.078.511	100	7.951.480.599	100,00	94,00	100	16.408.017.047	100,00	46,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	33.705.710.000	132	15.226.647.721	66	8.149.078.511	66	7.641.646.799	100,00	93,77	198	22.868.294.520	75,00	67,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	68	1.400.000.000	34	1.074.971.500	4	235.000.000	4	234.930.800	100,00	99,97	38	1.309.902.300	55,88	93,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	275.000.000	5	74.991.900	4	75.000.000	4	74.903.000	100,00	99,87	9	149.894.900	45,00	54,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	100	175.000.000	100	49.997.900	100	50.000.000	100	49.999.500	100,00	100,00	100	99.997.400	100,00	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16	175.000.000	4	49.997.900	1	50.000.000	1	49.999.500	100,00	100,00	5	99.997.400	31,25	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100	300.000.000	100	72.590.000	100	100.000.000	100	86.244.900	100,00	86,24	100	158.824.900	100,00	52,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16	200.000.000	4	49.990.000	4	50.000.000	4	49.999.900	100,00	100,00	8	99.989.900	50,00	49,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	100.000.000	5	22.590.000	5	50.000.000	5	36.245.000	100,00	72,49	10	58.835.000	50,00	58,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	100	6.564.397.850	100	1.873.090.177	100	2.169.796.000	100	2.168.754.242	100,00	99,95	100	4.041.844.419	100,00	61,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	113.120.000	12	28.279.900	12	28.280.000	12	28.279.900	100,00	100,00	24	56.559.800	50,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	460	750.230.000	115	318.319.300	23	123.580.250	23	123.550.200	100,00	99,98	138	441.869.500	30,00	58,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	48	39.156.650	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100,00	100,00	24	16.000.000	50,00	40,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	100.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	100,00	100,00	24	50.000.000	50,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	48	132.000.000	12	32.984.000	12	33.000.000	12	32.996.000	100,00	99,99	24	65.980.000	50,00	49,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.8.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	316.000.000	12	79.000.000	12	41.200.000	12	41.118.700	100,00	99,80	24	120.118.700	50,00	38,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	5.113.891.200	12	1.381.506.977	12	1.910.735.750	12	1.909.809.442	100,00	99,95	24	3.291.316.419	50,00	64,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	941.330.000	100	179.050.000	100	256.228.800	100	252.463.200	100,00	98,53	100	431.513.200	100,00	45,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	2	201.464.000			1	40.290.000	1	40.288.000	100,00	100,00	1	40.288.000	50,00	20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	84	941.330.000	21	179.050.000	12	215.938.800	12	212.175.200	100,00	98,26	33	391.225.200	39,29	41,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	2.245.490.000	100	510.105.297	100	461.020.000	100	449.386.762	100,00	97,47	100	959.472.059	208,33	42,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	684.000.000	12	98.695.297	12	126.600.000	12	114.946.762	100,00	90,80	24	213.532.059	50,00	31,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	1.561.490.000	12	411.520.000	12	334.420.000	12	334.420.000	100,00	100,00	24	745.940.000	50,00	47,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.614.185.050	100	525.304.449	100	769.988.200	100	769.457.985	100,00	99,93	100	1.294.762.434	100,00	49,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	1.597.084.000	15	317.003.449	15	455.868.200	15	455.723.985	100,00	99,97	30	772.727.434	50,00	48,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	452	235.840.000	113	58.860.000	84	56.640.000	84	56.640.000	100,00	100,00	197	115.500.000	43,58	48,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	781.261.050	1	149.441.000	1	257.470.000	1	257.094.000	100,00	99,85	2	406.535.000	50,00	52,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN SUDUT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	100	1.844.345.000	100	791.960.055	100	1.007.955.000	100	1.007.758.400	100,00	99,98	100	1.799.716.455	100,00	97,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.1	Pembagian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	869.126.000	100	224.997.055	100	367.088.000	100	366.909.700	100,00	99,95	100	591.906.755	100,00	68,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG masuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	196	869.126.000	49	224.997.055	49	367.088.000	49	366.909.700	100,00	99,95	98	591.906.755	50,00	68,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	100	975.219.000	100	566.963.000	100	513.840.000	100	513.829.700	100,00	100,00	100	1.080.792.700	100,00	110,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	4	975.219.000	1	566.963.000	1	513.840.000	1	513.829.700	100,00	100,00	2	1.080.792.700	50,00	110,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja s/d Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5=n-1		6		7		9=5+7		10=9/4*100		11	12
2.8.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar KIE PPPA	100	250.000.000			100	127.027.000	100	127.019.000	100	127.019.000	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.3.3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2	250.000.000			1	127.027.000	1	127.019.000	1	127.019.000	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Olah UPTD PPA	100	3.686.183.000	100	1.296.460.426	100	1.085.840.000	100	1.079.174.840	100	2.375.635.266	100,00	99,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	100	2.190.161.000	100	668.997.326	100	676.918.000	100	670.269.240	100	1.339.266.566	100,00	99,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Provinsi	4	525.161.000	1	257.159.500	1	181.918.000	1	181.882.000	2	439.041.500	100,00	99,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang Mendapatkan Pendampingan layanan perlindungan perempuan Kewenangan provinsi	60	1.665.000.000	15	411.837.826	15	495.000.000	15	488.387.240	30	900.225.066	100,00	98,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	1.496.022.000	100	282.044.000	100	217.500.000	100	217.500.000	100	499.544.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan provinsi	200	1.451.022.000	50	262.044.000	50	217.500.000	50	217.500.000	100	479.544.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perempuan dalam Konflik Sosial	100	1.245.645.000	50	345.419.100	100	191.422.000	100	191.405.600	100	536.824.700	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	200	847.347.000	50	345.419.100	1	191.422.000	1	191.405.600	51	536.824.700	25,50	63,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pendampingan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	100	2.199.934.400	100	524.846.000	100	535.780.000	100	533.920.779	100	1.058.766.779	100,00	99,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	100	2.199.934.400	100	524.846.000	100	535.780.000	100	533.920.779	100	1.058.766.779	100,00	99,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4.1.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	4	2.199.934.400	1	524.846.000	1	535.780.000	1	533.920.779	2	1.058.766.779	50,00	48,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5	PROGRAM PENGEL OLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100	1.957.093.200	100	524.823.100	100	241.243.000	100	240.597.500	100	765.420.600	100,00	99,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaluran Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	100	1.957.093.200	100	524.823.100	100	241.243.000	100	240.597.500	100	765.420.600	100,00	99,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.8.5.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	4	727.537.400	1	198.919.000	1	132.204.000	1	131.589.000	100,00	99,53	2	330.508.000	50,00	45,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.5.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelenbagaan data provinsi	4	1.229.555.800	1	325.904.100	1	109.039.000	1	109.008.500	100,00	99,97	2	434.912.600	50,00	35,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Lintas Pihakda Lintas Sektor Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	2.594.532.000	100	834.857.750	100	666.203.000	100	665.471.410	100,00	99,89	100	1.500.329.160	100,00	57,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2	Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	2.594.532.000	100	1.024.350.850	100	666.203.000	100	665.471.410	100,00	99,89	100	1.689.822.260	100,00	65,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	4	752.176.000	1	334.073.750	1	178.510.000	1	177.847.040	100,00	99,63	2	511.920.790	50,00	68,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi untuk pemenuhan hak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	4	475.347.000	1	325.904.100	1	77.690.000	1	77.663.370	100,00	99,97	2	403.567.470	50,00	84,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.6.2.4	Pengualan, Jejaring An tar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengualan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	4	1.367.009.000	1	364.373.000	1	410.003.000	1	409.961.000	100,00	99,99	2	774.334.000	50,00	56,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan dari UPTD PPA	100	541.098.000	100	309.885.000	100	249.182.000	100	248.528.400	100,00	99,74	100	558.413.400	100,00	103,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	100	541.098.000	100	208.079.000	100	185.432.000	100	185.324.000	100,00	99,94	100	393.403.000	100,00	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	4	541.098.000	1	208.079.000	1	185.432.000	1	185.324.000	100,00	99,94	2	393.403.000	50,00	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.3	Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kaasu Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100	160.000.000	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.204.400	100,00	99,14	100	140.010.400	100,00	87,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.7.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	4	160.000.000	1	76.806.000	1	63.750.000	1	63.204.400	100,00	99,14	2	140.010.400	50,00	87,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)	8	318.652.000	15,83	90.000.000	15	61.038.000	11,44	60.965.900	100,00	99,88	11,44	150.965.900	57,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.2.1	Penaduan dan Sinkronisasi Kebutuhan Daerah Provinsi dengan rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	100	318.652.000	100	90.000.000	100	61.038.000	100	60.965.900	100,00	99,88	100	150.965.900	100,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Evaluasi Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.14.2.1.7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Dinas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada dinas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	4	318.652.000	1	90.000.000	1	61.038.000	1	60.965.900	100,00	150.965.900	50,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			100	481.302.000	100	139.157.000	100	71.918.000	100	71.843.800	100,00	211.000.800	100,00	43,84		
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	100	481.302.000	100	139.157.000	100	71.918.000	100	71.843.800	100,00	211.000.800	100,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.3.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	481.302.000	100	139.157.000	100	71.918.000	100	71.843.800	100,00	211.000.800	100,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.3.1.8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	4	481.302.000	1	139.157.000	1	71.918.000	1	71.843.800	100,00	211.000.800	50,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	986.086.000	100	315.000.000	100	1.265.888.000	100	1.265.517.700	100,00	1.580.517.700	100,00	160,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.4.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	660.380.000	100	225.000.000	100	1.180.000.000	100	1.179.648.800	100,00	1.404.648.800	100,00	212,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.4.1.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyajian pengasuhan 1000 HPK	4	1.660.380.000	1	225.000.000	1	1.180.000.000	1	1.179.648.800	100,00	1.404.648.800	50,00	84,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.4.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan edukasi pembangunan keluarga	100	325.706.000	100	90.000.000	100	85.888.000	100	85.868.900	100,00	175.868.900	100,00	54,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.4.2.4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga (BKR), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Se	4	325.706.000	1	90.000.000	1	85.888.000	1	85.868.900	100,00	175.868.900	50,00	54,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Rata-rata capaian Kinerja										96,87		Sangat Tinggi				